

SKANDAL DONNER (1900-1902): SEBUAH GERAKAN POLITIK ARSIP

Oleh: Dharwis Widya Utama Yacob, S.S.

Abstract

Skandal Donner was the event of the taking down of Regents of Madiun, Raden Adipati Brotodiningrat, by the Resident of Madiun, J.J. Donner. It was full of intentionally issues and also with full of debate in the newspapers. The debate in the newspaper pioneered by Tirta Adhi Soerjo in Pembrita Betawi. This scandal appeared uncomfortable situation in the government of around Java especially East Java, Central Java, and West Java. The regents around Java were worry about their legitimation. Their worry about their legitimation were being demoted as same as Raden Adipati Brotodiningrat. The news about Raden Adipati Brotodiningrat were separated by two sides. One side supported J.J. Donner and the other sides supported Raden Adipati Brotodiningrat. Most of the newspapers which supported J.J. Donner was from Netherlands Newspapers such as De Locomotief and the most newspapers which supported Raden Adipati Brotodiningrat was from indigenous people. archival publication are two kinds of findings aids which have different forms dan function. Nevertheless, users still don't know the function and how to use guides and archival publication even archivist still not yet understand the different between among those. Political movement is social movement in political aspect. A political movement can organize by individual issues or a lot of issues or one set of concern with social group. A political movement has a goal to ensure citizen and/or civil servants to take an action. A political movement can be local, regional, national, or international. Some of them has to chance about policy such as anti-war movement, ecology movement, and anti-globalization movement. A political movement can also to centralize or decentralize nation control, such as anarchism, facism, and nazism. The political movement of archives is one of political movement. The political movement of archives is being pioneered by Tirta Adhi Soerjo which called Skandal Donner.

Keyword: Skandal Donner, Raden Adipati Brotodiningrat, Tirta Adhi Soerjo, J.J. Donner, the political movement of archives.

A. Latar Belakang

Arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu *archeon* yang memiliki arti milik sebuah kantor.⁸³ Dari kata *archeon* masih ditemukan kata asalnya yaitu *arche* yang terbentuk dari dua kata yaitu *archaios* artinya kuno dan *archi* yang artinya tempat utama dan

⁸³ Yayan Daryan dan Hardi Suhardi, *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998, hal.6.

kekuasaan.⁸⁴ Arsip memiliki definisi yaitu tempat rekam publik disimpan dan rekaman bersejarah atau dokumen diselamatkan.⁸⁵ Selain itu, arsip juga memiliki definisi yaitu dokumen-dokumen yang diciptakan atau diterima dan diakumulasikan oleh orang atau organisasi dalam tugasnya untuk mengatur hubungan dan diselamatkan dikarenakan nilai yang berkelanjutan. Arsip selalu merujuk kepada organisasi, agen atau program yang bertanggung jawab pada proses seleksi, perawatan, dan penggunaan rekaman yang berkelanjutan serta juga merujuk pada tempat penyimpanan, bangunan atau tempat yang didedikasikan pada penyimpanan, penyelamatan, dan penggunaan.⁸⁶ Arsip juga memiliki arti yaitu naskah atau dokumen atau catatan atau informasi terekam dalam bentuk dan corak apapun yang dibuat dan atau diterima oleh sesuatu institusi atau perseorangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.⁸⁷

Politik juga berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang memiliki arti negara kota atau masyarakat yang terorganisasi.⁸⁸ Politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik juga memiliki arti usaha untuk menentukan peraturan yang diterima baik oleh warga dan membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁸⁹ Politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan diantara anggota-anggotanya. Politik juga kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya.⁹⁰ Politik juga memiliki arti seni mengatur dan mengurus negara. Mengurus negara ini dijalankan dengan cara, aturan dan hukum berbeda.⁹¹

Gerakan politik adalah gerakan sosial di bidang politik. Sebuah gerakan politik dapat diorganisir melalui isu tunggal atau serangkaian isu, atau sekitar satu set keprihatinan bersama kelompok sosial. Sebuah gerakan politik bertujuan untuk meyakinkan warga negara dan/atau pegawai pemerintah untuk mengambil tindakan yang

⁸⁴ Sulisty Basuki, *Pengantar Kearsipan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996, hal.2

⁸⁵ Hillary Jenkinson, *A Manual of Archive Administration Including the Problems of War Archives and Archive Making*, London, Edinburg, New York, Toronto, Melbourne and Bombay: The Clarendon Press, 1922, hal.3.

⁸⁶ Sue McKemmish, "Introducing Archives and Archival Programs" dalam *Keeping Archives Second Edition*, Edited by Judith Ellis, Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993, hal.2.

⁸⁷ Sauki Hadiwardoyo dkk, *Terminologi Kearsipan Nasional*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2002, hal.5

⁸⁸ Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal.5

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.15

⁹⁰ *Ibid*, hal.16

⁹¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013, hal.394.

merupakan fokus gerakan. Sebuah gerakan politik dapat lokal, regional, nasional, atau dalam lingkup internasional. Beberapa bertujuan untuk mengubah kebijakan pemerintah, seperti gerakan anti-perang, gerakan ekologi, dan gerakan anti-globalisasi. Gerakan politik juga dapat melibatkan perjuangan untuk mendesentralisasikan atau sentralisasi kontrol negara, seperti di Anarkisme, Fasisme, dan Nazisme.⁹² Gerakan politik arsip merupakan salah satu bentuk dari gerakan politik. Gerakan politik arsip ini dipelopori oleh Tirto Adhi Soerjo yang dikenal dengan *Skandal Donner*.

B. Permasalahan Pokok

Skandal Donner merupakan peristiwa penurunan jabatan Bupati Madiun, Raden Adipati Brotodiningrat oleh Residen Madiun J.J. Donner. Penurunan Bupati Madiun ini ternyata dipenuhi oleh isu-isu kesengajaan. Ditambah pula pemberitaan pada saat itu begitu gencarnya. Pemberitaan itu dipelopori oleh Tirto Adhi Soerjo yang menuliskan skandal ini berturut-turut di Surat Kabar *Pembrita Betawi*. Skandal ini menimbulkan ketidaknyamanan suasana pemerintahan di Jawa terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Para bupati di seputar Jawa yang merupakan golongan priyayi begitu khawatir dengan kekuasaan mereka. Para bupati merasa kekuasaannya akan bermasalah seperti yang dialami oleh Bupati Madiun, Brotodiningrat. Berita-berita yang ditulis di berbagai media pada masa itu juga terpecah menjadi dua pihak. Ada yang membela dari pihak Donner dan ada yang mendukung Brotodiningrat. Kebanyakan surat kabar yang membela Donner adalah surat kabar milik Belanda seperti *De Locomotief* sedangkan yang membela Brotodiningrat adalah surat kabar milik pribumi.⁹³

Skandal Donner ini tidak hanya menimbulkan kegemparan di seputar pemerintahan bupati di Jawa, tetapi juga di dalam Pemerintah Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Willem Roseboom⁹⁴ juga dianggap ikut serta dalam penurunan jabatan bupati Madiun tersebut dan dianggap berada di pihak Donner. Tak lupa lembaga pemerintah kolonial Belanda yang memiliki fungsi yang penting seperti *Algemene Secretarie*⁹⁵

⁹² Aden Bagoes, "Pengertian Gerakan Sosial Politik". (Online) Sumber elektronik diakses dari id.shvoong.com. Diakses 15 Juni 2014 pukul 13.31 WIB.

⁹³ *op.cit.*, hal 28-29.

⁹⁴ Willem Roseboom merupakan Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Belanda yang memerintah dari tahun 1899 sampai dengan tahun 1904. Gubernur jenderal sebelumnya adalah Carel H.A. van der Wijck dan Gubernur Jenderal setelahnya adalah J.B. van Heutsz. Lihat Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011, lampiran I.

⁹⁵ *Algemene Secretarie* merupakan organisasi kesekretariatan yang berasal dari penggabungan antara *Gouvernement Secretarie* (sekretariat yang membantu tugas Gubernur Jenderal) dan *Generale Secretarie* (sekretariat yang membantu Komisaris Jenderal) yang didirikan pada tahun 1819 yang memiliki tugas antara

ternyata ikut merasakan kegemparan tersebut. *Algemene Secretarie* tidak ingin institusinya dianggap ikut serta dalam skandal ini. Untuk mengamankan posisinya, *Algemene Secretarie* menunjuk Snouck Hurgronje untuk menganalisa sejumlah laporan-laporan Donner kepada Gubernur Jenderal.⁹⁶

C. Perumusan Masalah

Skandal Donner merupakan gerakan politik arsip. Gerakan politik arsip ini merupakan gerakan politik yang berkaitan dengan arsip yaitu arsip *Algemene Secretarie*. Kasus ini menjadi gerakan politik pertama yang menjadikan arsip sebagai fokus permasalahan. Tentunya kasus ini sebagai pelopor bahwa arsip menjadi faktor terpenting dalam penyelesaian masalahnya.

Dalam tulisan ini, sesuai dengan penjelasan diatas, berusaha menjelaskan *Skandal Donner* sebagai bentuk gerakan politik arsip dalam pemerintahan kolonial Belanda. **Bagaimanakah *Skandal Donner* ini bisa terjadi? Mengapa *Skandal Donner* ini penting bagi dunia kearsipan?**

Dalam *Skandal Donner* menjadikan arsip sebagai faktor terpenting. Kepentingan-kepentingan politik pada masa itu akhirnya takluk atas kekuatan sebuah arsip itu sendiri. Dengan ditulisnya penelitian ini supaya pembaca yang merupakan pengguna arsip mampu mengetahui bahwa arsip menjadi kekuatan terbesar bahkan mampu mengalahkan kepentingan-kepentingan politik yang berkembang pada masa itu. Kasus ini melibatkan banyak pihak yaitu pimpinan pribumi terutama para bupati, residen-residen yang berasal dari kaum Eropa, para jurnalis surat kabar yang memiliki idealisme yang berbeda-beda sesuai dengan visi misi surat kabar tersebut, lembaga pemerintah kolonial Belanda termasuk sampai dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tentunya *Skandal Donner* ini menjadi salah satu contoh untuk penyelesaian masalah-masalah di masa sekarang yang menggunakan arsip sebagai fokus permasalahannya.

Dalam penelitian ini terfokus pada *Skandal Donner* itu sendiri, bagaimana latar belakang terjadinya skandal ini kemudian bagaimana konflik-konflik terus terjadi selama

lain memberi masukan dan informasi kepada gubernur jenderal, mengkaji setiap usulan oleh kepala departemen, mengedit format surat keputusan, mengedit isi *Javasche Courant* (surat kabar resmi pemerintah), menangani berbagai macam laporan dan data statistik yang dikirim ke pemerintah pusat di Belanda, serta mengkompilasi penyusunan *Staatblad van Nederlandsch-Indie*. Nadia F. Dwiandari, Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, *Guide Arsip Algemene Secretarie (1816) 1819-1950*, Jakarta: Direktorat Pengolahan Kedeputian Bidang Konservasi Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, hal 5.

⁹⁶ *Ibid.*, hal.29.

skandal ini bergulir ditambah lagi dengan pelaku-pelaku yang ikut serta dalam skandal ini yang begitu banyak sehingga menjadikan skandal ini menjadi masalah besar yang berkembang di Hindia Belanda terutama di Pulau Jawa.

Tulisan ini merupakan hasil analisis dari kerangka berpikir dari berbagai pustaka yang berhasil dirangkum dalam satu kesatuan pemikiran ditambah dengan analisis dari penulis mengenai peristiwa yang terjadi. Tentu saja hasil pemikiran dan analisis ini belum tentu mewakili keseluruhan dari peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat antara lain metode pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan suatu peristiwa dan juga untuk mendapatkan data primer dan sekunder sehingga memperjelas *Skandal Donner* itu sendiri.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: (1) penelitian pustaka guna memperoleh data primer dan sekunder sehingga diharapkan dapat memperjelas berbagai hal yang ditemukan dalam penelitian kualitatif; (2) penelitian arsip atau dokumen yang disebut kajian isi yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah arsip.⁹⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memahami peristiwa tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Konsep adalah konstruksi mental dan merupakan suatu ide yang abstrak untuk mengerti dan menunjuk kepada beberapa fenomena. Dengan kata lain, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi atau pencerminan persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar beberapa konsep atau seperangkat konsep disusun untuk merumuskan generalisasi. Generalisasi yang paling tinggi adalah teori. Dalam hal ini ilmu kearsipan dan ilmu politik harus dikemukakan.⁹⁸

Arsip merupakan dokumen yang dibuat dalam bagian dari transaksi resmi dan juga disimpan untuk kepentingan resmi.⁹⁹ Arsip juga merupakan media yang membawa informasi yang diciptakan oleh organisasi dalam melakukan kegiatannya dan memiliki nilai simpan serta diseleksi untuk kepentingan tertentu dari media produksi organisasi yang besar dalam waktu yang lama dan waktu yang sangat lama.¹⁰⁰

⁹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2013, hal.220.

⁹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.43

⁹⁹ Hillary Jenkinson, *A Manual of Archives Administration Including the Problems of War Archives and Archive Making*, Oxford: Clarendon Press, 1922, hal.4.

¹⁰⁰ Sue Mckemmish, "Introducing Archives dan Archival Programs" dalam *Keeping Archives Second Edition*, Edited by Judith Ellis, Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993, hal.2.

Politik adalah usaha untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Politik juga memiliki arti usaha untuk menentukan peraturan yang diterima baik oleh warga dan membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis.¹⁰¹ Politik adalah kegiatan yang menyangkut bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha mendamaikan perbedaan diantara anggota-anggotanya. Politik juga kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya.¹⁰² Politik juga memiliki arti seni mengatur dan mengurus negara. Mengurus negara ini dijalankan dengan cara, aturan dan hukum berbeda.¹⁰³ Salah satu kegiatan politik adalah gerakan politik.

Gerakan politik adalah gerakan sosial di bidang politik. Gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program.¹⁰⁴ Secara teoritis gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tapi bisa juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.¹⁰⁵

Karena keragaman gerakan sosial sangat besar, maka berbagai ahli sosiologi mencoba menklarifikasikan dengan menggunakan kriteria tertentu. David Aberle, misalnya, dengan menggunakan kriteria tipe perubahan yang dikehendaki (perubahan perorangan dan perubahan sosial) dan besar pengaruhnya yang diinginkan (perubahan untuk sebagian dan perubahan menyeluruh). Membedakan empat tipe gerakan sosial, tipologi Aberle adalah sebagai berikut:

1. *Alternative Movement*

¹⁰¹ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hal.15

¹⁰² *Ibid*, hal.16

¹⁰³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013, hal.394.

¹⁰⁴ Anonim, "Pengertian Gerakan Sosial Politik". (Online) Sumber elektronik diakses dari www.shvong.com. Diakses 24 Juni 2014 pukul 11.30.WIB.

¹⁰⁵ Andi Poldi, "Gerakan Sosial Menurut Para Ahli ". (Online) Sumber elektronik diakses dari www.andipoldi.blogspot.com. Diakses 15 Juni 2014 pukul 13.47 WIB.

Ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk merubah sebagian perilaku perorangan. Dalam kategori ini dapat kita masukan berbagai kampanye untuk merubah perilaku tertentu, seperti misalnya kampanye agar orang tidak minum-minuman keras.

2. *Rodemptive Movement*

Gerakan ini lebih luas dibandingkan dengan *alterative movement*, karena yang hendak dicapai ialah perubahan menyeluruh pada perilaku perorangan. Gerakan ini kebanyakan terdapat di bidang agama. Melalui gerakan ini perorangan diharap untuk bertobat dan mengubah cara hidupnya sesuai dengan ajaran agama.

3. *Reformative Movement*

Gerakan ini yang hendak diubah bukan perorangan melainkan masyarakat namun lingkup yang hendak diubah hanya segi-segi tertentu masyarakat, misalnya Gerakan *people power* di Filipina dapat dikategorikan dalam tipe ini karena tujuannya terbatas, yaitu pergantian pemerintah.

4. *Transformative Movement*

Gerakan ini merupakan gerakan untuk mengubah masyarakat secara menyeluruh. Gerakan kaum Khmer Merah untuk menciptakan masyarakat komunis di Cambodia. Suatu proses dalam mana seluruh penduduk kota dipindahkan ke desa dan lebih dari satu juta orang Cambodia kehilangan nyawa mereka karena dibunuh kaum Khmer Merah.¹⁰⁶

Gerakan politik arsip dalam hal ini adalah *Skandal Donner* merupakan gerakan politik yang dikategorikan sebagai *alterative movement*. Hal ini disebabkan oleh gerakan politik arsip ini berusaha merubah sebagian perilaku perorangan di masa itu dengan sesuatu yang lebih baru yaitu dengan perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial melaui bukti-bukti melalui arsip.

E. PEMBAHASAN

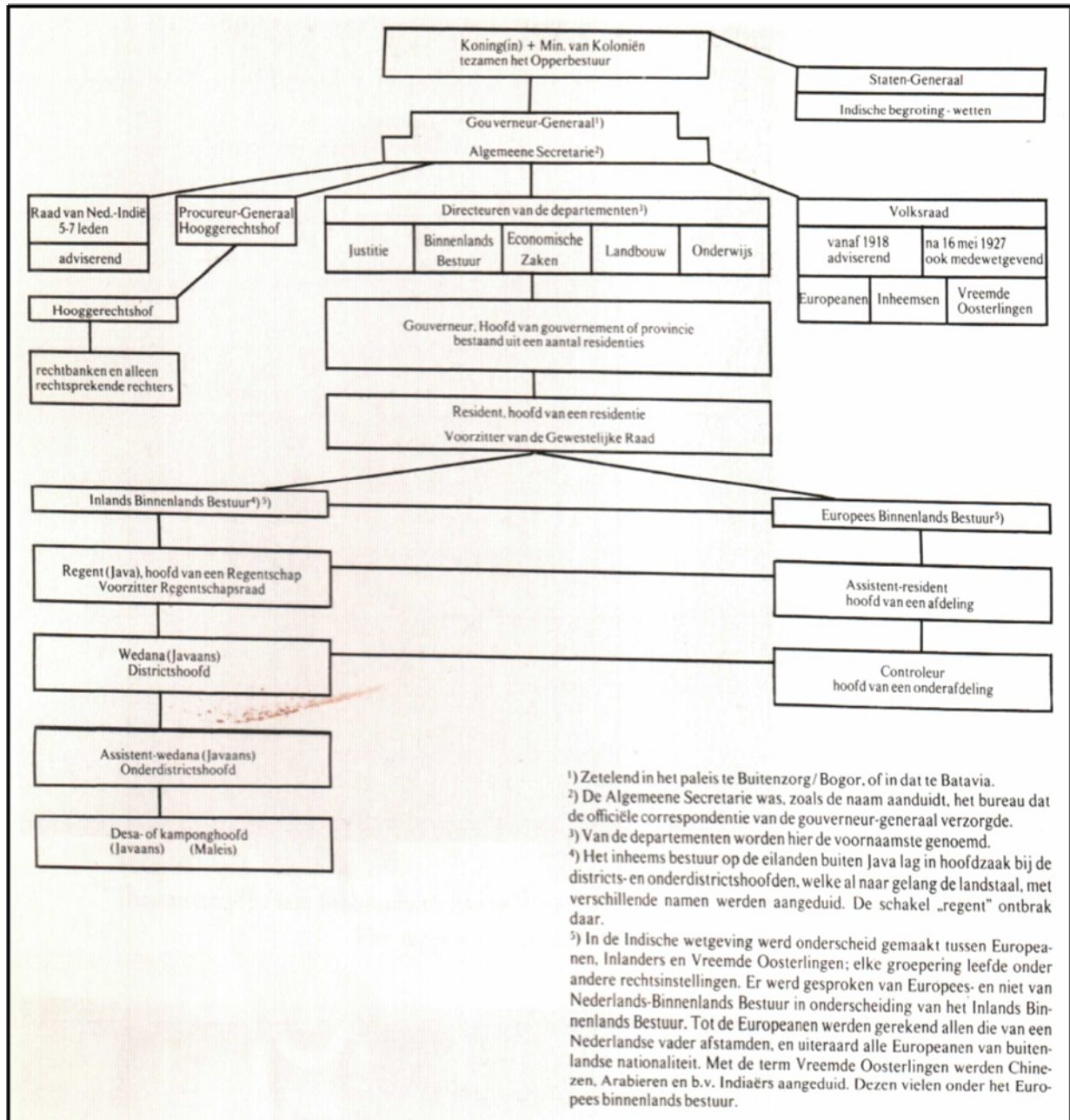
1. *Sandal Donner: Sebuah Latar Belakang Peristiwa*

Skandal Donner terjadi tidak luput dari nama Donner itu sendiri. Donner merupakan nama Residen Madiun yaitu J. J. Donner. Posisi J. J. Donner dalam sistem pemerintahan berada di bawah gubernur dan memiliki bawahan yaitu asisten residen dan *regents* (bupati). Asisten residen dijabat oleh kalangan Eropa terutama

¹⁰⁶Anonim, "Gerakan Sosial di Indonesia: Pengertian dan Konsep Gerakan Sosial". (Online) Sumber elektronik diakses dari abichuenk.wordpress.com. Diakses 15 Juni 2014 pukul 14.02.WIB.

Orang Belanda sedangkan *regents* (bupati) dijabat oleh kalangan pribumi. Untuk lebih jelasnya bisa melihat struktur organisasi pemerintahan kolonial Belanda dibawah ini.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kolonial Belanda



Sumber: Bob de Graaf, *Kalm Te Midden Van Woedende Golven: Het Ministerie Van Kolonien En Zijn Taakomgeving 1912-1940*, Amsterdam: Sdu Uitgevers, Tanpa Tahun

Kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda yang tertinggi adalah gubernur jenderal. Gubernur jenderal harus bertanggung jawab serta memperhatikan instruksi-instruksi Raja Belanda. Gubernur jenderal diangkat dengan keputusan Raja Belanda

berdasarkan usul Menteri Jajahan (*Ministerie van Kolonien*). Gubernur jenderal harus orang Belanda dan sedikitnya berumur 30 tahun. Gubernur jenderal bertugas menyelenggarakan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah dengan memperhatikan petunjuk raja. Gubernur jenderal mempunyai hak eksorbitante (*exorbitante rechten*) yang berwenang untuk mengasingkan seseorang yang dipandang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum. Gubernur jenderal juga mengetuai Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch-Indie*) serta membawahi beberapa departemen seperti *Binnenlands Bestuur* (Departemen Dalam Negeri), *Financieen* (Departemen Keuangan), *Justitie* (Departemen Kehakiman), *Onderwijs en Eredienst* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), dan *Landbouw* (Departemen Pertanian).¹⁰⁷

Pada akhir abad ke-19 muncul gagasan untuk menerapkan sistem desentralisasi di pemerintahan kolonial Belanda. Pikiran tersebut merupakan bagian pokok dari Politik Etis¹⁰⁸ yang dijalankan sejak pertengahan abad 19. Bahkan tujuan dari pendukung politik etis tersebut adalah desentralisasi dari pemerintah Kerajaan Belanda di Den Haag ke Batavia, dan dari Batavia diteruskan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda. Pada tahun 1882 diadakan penelitian tentang administrasi pemerintahan di Jawa sebagai dasar bagi penerapan desentralisasi dan penelitian kedua diadakan pada tahun 1893-1894.¹⁰⁹

Sejalan dengan penelitian tersebut, pada tahun 1901 mulai diadakan perubahan-perubahan di bidang pemerintahan termasuk dimulainya pembagian keresidenan (*afdeeling*). Pada tahun 1903 berlaku Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatiewet*) 1903 dan pada tahun 1905 berlaku pula Keputusan Desentralisasi (*Decentralisatie Besluit*). Dari kedua keputusan tersebut terbentuklah Dewan Lokal yang memiliki otonomi. Dewan Lokal tersebut harus dibentuk dan disesuaikan sehingga terbentuk provinsi (*province*), kabupaten (*regentschap*), kotamadya (*stadsgemeente*), dan *groepsgemeenteschap* (kelompok golongan). Tiap provinsi memiliki gubernur yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai pejabat/wakil

¹⁰⁷ A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal.83-87.

¹⁰⁸ Politik etis merupakan sistem politik terakhir yang diterapkan Pemerintah Kolonial Belanda setelah Sistem Tanam Paksa dan Periode Liberal. Politik Etis ini merupakan bentuk protes terhadap pemerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial terhadap Hindia-Belanda dan ungkapan rasa prihatin terhadap Hindia Belanda. lihat Dharwis Widya Utama Yacob, "Implementasi Politik Etis Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Perkebunan Daerah Lampung, 1905-1930", (Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana pada universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta, 2005), hal.18-19.

¹⁰⁹ Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011, hal.194-195.

pemerintah pusat dan sebagai kepala eksekutif pemerintah provinsi. Setiap provinsi seperti di Jawa dan Madura terbagi menjadi keresidenan (*afdeeling*) yang dikepalai oleh seorang residen. Residen bertugas untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah *afdeeling* terutama dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, contohnya Residen Madiun. Residen memiliki bawahan orang Eropa terutama orang Belanda seperti asisten residen dan *controleur*, namun mereka hanyalah membantu tugas residen dan sebagai pejabat pelengkap dengan tugas khusus di bidang pertahanan dan kepolisian.¹¹⁰

Tiap keresidenan (*afdeeling*) terdiri dari 2 sampai 6 kabupaten (*regentschap*) yang dikepalai oleh seorang bupati (*regents*). Sampai dengan tahun 1938, seluruh Jawa terdiri dari 17 kabupaten termasuk Kabupaten Bojonegoro. Di bawah kabupaten terdapat distrik yang dikepalai oleh seorang kepala distrik (*wedana*) yang membawahi sub distrik yang dipimpin oleh seorang asisten sub-distrik (asisten *wedana*). Di dalam masing-masing sub-distrik terdapat komunitas pribumi (*inlandsch gemeenten*) yaitu desa. Jabatan pribumi tertinggi setelah bupati adalah patih. Patih bertugas membantu tugas-tugas umum bupati. Patih bertanggung jawab atas sebuah distrik yang masuk wilayah kabupaten. Pejabat-pejabat pribumi dari bupati ke bawah merupakan Korps Pemerintah Pribumi atau disebut juga *Inlandsche Binnenlands Bestuur* sedangkan *controleur* dan asisten residen ke atas merupakan Korps Pemerintahan Belanda atau *Nederlandse Binnenland Bestuur* atau bisa dilihat di struktur pemerintahan diatas.¹¹¹

Pembedaan antara *Inlandsche Binnenlands Bestuur* dan *Nederlandse Binnenland Bestuur* inilah yang sering memicu konflik. Terkadang antara residen dan bupati bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada yang merasa lebih tinggi dengan yang lain tapi kadang pula terjadi konflik antara residen dan bupati dikarenakan kewenangannya yang tumpang tindih. Begitu pula dengan konflik yang terjadi pada *Skandal Donner*.

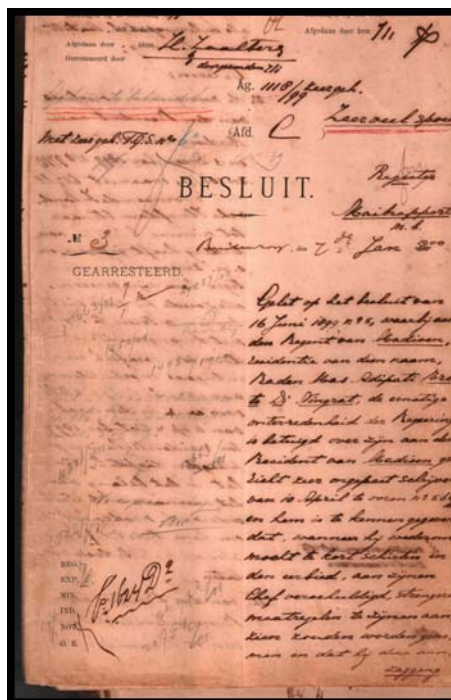
2. *Skandal Donner*: Sebuah Alur Peristiwa Gerakan Politik Arsip

Skandal Donner ini adalah skandal yang dibuat oleh J.J Donner, seorang Residen Madiun, untuk menurunkan kekuasaan Bupati Madiun, Raden Adipati

¹¹⁰ *Ibid*, hal.96

¹¹¹ *Ibid*, hal.96-98.

Brotodiningrat¹¹². J.J Donner bekerja sama dengan Patih Madiun, Mangoen Atmodjo dan Jaksa-Kepala Adipoetro. J.J. Donner melaporkan kepada Gubernur Jenderal Willem Rooseboom bahwa Raden Adipati Brotodiningrat adalah pemimpin sejumlah kerusuhan di Karesidenan Madiun termasuk seluruh Jawa, dari Bantam (Banten) sampai Banyuwangi. Dalam laporannya, Donner memberi keterangan bahwa Raden Adipati Brotodiningrat mendapat bantuan dari sanak familinya, sebagian besar bupati di seluruh Jawa, kepala polisi, pegawai-pegawai pribumi, redaktur berbagai koran, para kriminal-kriminal di seluruh Pulau Jawa.¹¹³



Surat Keputusan pengangkatan Raden Mas Adipati Brotodiningrat sebagai Bupati Madioen, Buitenzorg (Bogor), 7 Januari 1900

(Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit* 1891-1942 No. 715)

Laporan J.J. Donner itu menimbulkan kecurigaan bagi kaum pribumi di Jawa termasuk Tirto Adhi Soerjo, seorang jurnalis yang memiliki hubungan keluarga dengan beberapa bupati di Jawa. Tirto Adhi Soerjo mengumpulkan data tentang tindakan J.J. Donner termasuk mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan

¹¹²Raden Adipati Brotodiningrat diangkat pada tanggal 7 Januari 1900 sebagai Residen Madiun. Lihat *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit* 1891-1942 No. 715.

¹¹³Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985, hal. 28-29.

laporan tersebut yang kemudian dimuat di *Pemberita Betawi*. Tirto Adhi Soerjo memberikan saran agar pemerintah mengadakan penyelidikan atas kasus tersebut.¹¹⁴

Dari Panorogo, Madioen, orang toelis bahoewa toean fiskal Raad van Justitie di Semarang soeda dateng di sana aken priksa pengadoewan Kandjeng Raden Mas Adipati Broto Dhi Ningrat, regent pensioen jang ada tinggal di Djokjakarta. Paperikunan toewan Biskal ini soeda di lakoekan dengan amat setia, sedang jang terpriksapoen tida nanti boeka sedikitpoen barang apa jang soeda di tanja oleh toewan biskal itoe. Kabar-nja dalem ini hal ada tersangkoet seorang Mentri polisi, anaknja seorang Patik, jang soeda terdakwa bli saksi palsoe, sementara doro Mantri itoe soeda di koerniakan pangkat assistent wedono, boekan dari toewan biskal, tetapi dari pamarentah di Madioen, jang tida taoe sedikitpoen atas hal pepriksaan Justitie ini. Moedah-moedahan vrouwe Justitie membri poetoesan jang adil, sebab kaloe blon ada poetoesan jang adil, boleh djadi pri di residenti ini masi koesoet sadja soedah tentoe kadoewa fihak jang dakwa dan jang terdakwa itoe tida enak-enak makan dan tidoer, lain sekali doegaan Bintang Semarang aken menjela Hoekoem Hindia jang sring moeat hal pekabarannya perkaranya Reg. Mad. pensioen itoe, bahoewa jang poenja pekara tinggal enak-enak, orang lain toeroet tjampoer.

Guntingan tulisan artikel Tirto Adhi Soerjo dalam Surat Kabar *Pembrita Betawi* pada tanggal 17 Mei 1902 yang telah direproduksi sesuai dengan aslinya berisi mengenai pembelaan terhadap Brotodiningrat

(Sumber: Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985, hal. 31)

Meskipun Tirto Adhi Soerjo telah menulis banyak artikel di koran-koran yang memberitahukan bahwa laporan J.J. Donner adalah tidak benar, Raden Adipati Brotodiningrat tetap saja disidangkan di *Landraad*.¹¹⁵ J.J. Donner menghalangi munculnya saksi dengan menggunakan kekuasaannya. Dan akhirnya Raden Adipati Brotodiningrat dinyatakan bersalah oleh *Landraad* dan dibuang ke Padang.¹¹⁶

Di lain pihak, artikel-artikel Tirto Adhi Soerjo tetap mengungkapkan ketidakadilan atas pencopotan Bupati Madiun.¹¹⁷ Pada akhirnya *Algemene Secretarie* memerintahkan *Adviseur voor Inlandsche Zaken* (Penasihat Urusan Pribumi) C.

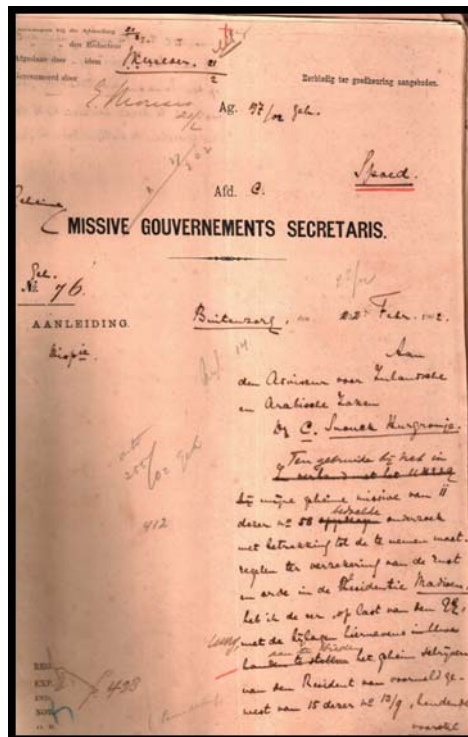
¹¹⁴ *Ibid*, hal. 29.

¹¹⁵ *Landraad* atau Pengadilan Negeri adalah pengadilan untuk kaum pribumi yang terdapat di kota besar terutama di ibukota kabupaten. Lihat A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hal.95.

¹¹⁶ *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit* 1891-1942 No. 4025.

¹¹⁷ Lihat *Pembrita Betawi* Edisi tanggal 17 April 1902, 24 April 1902, 17 Mei 1902, 12 Juni 1902, 18 Juni 1902, 4 Agustus 1902

Snouck Hurgronje untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan J.J. Donner pada Gubernur Jenderal.¹¹⁸

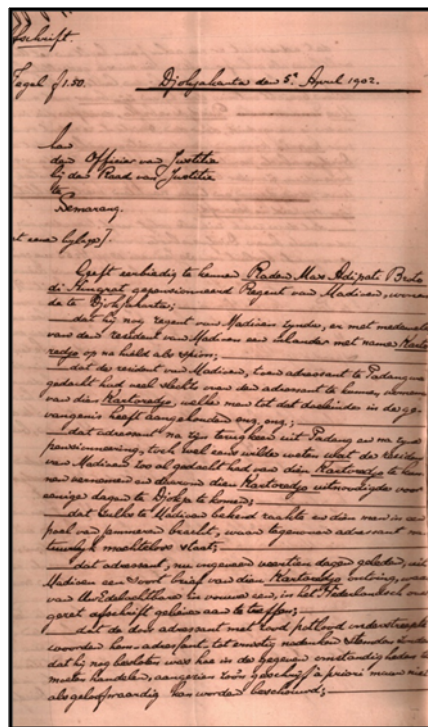


Surat permintaan dari Algemene Secretarie untuk menunjuk Snouck Hurgronje untuk menangani kasus Raden Adipati Brotodiningrat, 12 Februari 1902
(Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 4025*)



Snouck Hurgronje
(Sumber: ANRI, Khazanah Arsip Personal P03/018)

¹¹⁸ *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 4025*



Surat berisi vonis Raden Adipati Brotodiningrat, 5 April 1902

(Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942* No. 4025)

C. Snouck Hurgronje dalam suratnya pada tanggal 29 Desember 1902 kepada Gubernur Jenderal Willem Roseboom mendapatkan kesimpulan bahwa tuduhan J.J. Donner pada Raden Adipati Brotodiningrat adalah salah. Raden Adipati Brotodiningrat dianggap sebagai korban salah tafsir. Namun, surat Snouck Hurgronje ini menjadi sia-sia karena Raden Adipati Brotodiningrat telah sampai di pembuangannya di Padang.¹¹⁹

3. Skandal Donner: Sebuah Fenomena dalam Dunia Kearsipan

Arsip merupakan catatan sezaman yang dekat dengan kejadian sehingga ketersediaan arsip menjadi faktor utama ketika terjadi permasalahan di masa yang akan datang. Kontribusi arsip adalah sebagai bukti mengenai adanya sebuah peristiwa yang pernah dialami. Arsip juga memberikan gambaran atas peristiwa yang terlihat sehingga mampu memberikan kesaksian yang cenderung dilupakan orang. Selain itu

¹¹⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985, hal. 29

pula, informasi yang terdapat pada arsip tidak dapat direkayasa tetapi menampilkan apa adanya sesuai dengan peristiwa.¹²⁰

Arsip merupakan *first-hand knowledge* karena hasil yang diciptakan oleh arsip tanpa adanya kepentingan pribadi meskipun subyektivitas pribadi penciptanya tetap ada. Arsip diciptakan dengan ketelitian yang baik karena kesalahan dan pemalsuan akan merugikan kepentingan di masa yang akan datang. Arsip pun juga biasanya tersusun secara lengkap dan terpelihara karena diciptakan oleh organisasi-organisasi terutama organisasi politik dan organisasi yang berkuasa seperti pemerintah. Tentunya pemerintah menangani banyak hal mencakup kehidupan bernegara sehingga membutuhkan pencatatan-pencatatan. Pencatatan-pencatatan tersebut adalah fungsi arsip. Arsip itu dibuat untuk kepentingan praktis pemerintah itu sendiri sehingga subyektivitas berkadar kecil dan tanpa kepentingan pribadi.¹²¹

Politik identik terhadap kehidupan masyarakat. Masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber daya alam atau dicari jalan distribusi sumber daya alam semua warga merasa puas dan bahagia. Usaha tersebut dicapai dengan berbagai cara yang terkadang bertentangan dengan lainnya. Politik itu sering berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu karena negara adalah bagian dari politik. Selain itu pula, politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan dan juga mempelajari sifat dan tujuan negara yang merupakan organisasi kekuasaan serta faktor-faktor kekuasaan lain yang tidak resni yang dapat memengaruhi orang lain. Peran politik yang terpenting adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang merupakan kepentingan umum dari suatu negara.¹²²

Dikarenakan sifatnya untuk kepentingan umum maka keputusan harus menghindari keputusan yang subyektif. Peran arsip disini sangatlah penting karena hasil yang didapat oleh arsip sifatnya lebih obyektif. Ini terjadi pada *Skandal Donner*. *Skandal Donner* merupakan kejadian politik yang menjadikan fokus utama. *Skandal*

¹²⁰ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Modul Arsip Sebagai Sumber Penelitian*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Arsip Nasional Republik Indonesia, 2009, hal.1-47.

¹²¹ Soeri Soeroto, "Penelitian Bahan-Bahan Arsip: Masalah dan Kenyataan" dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, *Arsip dan Sejarah*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1980, hal.67-68.

¹²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hal.17-21

Donner menjadi suatu bentuk bahwa meskipun terjadi pendapat-pendapat yang berbeda-beda tentang suatu peristiwa tapi ketika menghadapi arsip sebagai buktinya tentu hasilnya lebih obyektif. *Skandal Donner* menunjukkan bahwa kekuatan arsip itu begitu kuat, meskipun kekuasaan yang dimiliki seseorang begitu besar tapi kebenaran tetap menjadi pemenang. Kebenaran itu datangnya dari arsip itu sendiri. Meskipun politik itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah tapi dengan adanya arsip kebenaran bisa diperoleh. *Skandal Donner* membuktikan bagi dunia kearsipan bahwa kekuatan arsip itu begitu tinggi. *Skandal Donner* dijadikan sebagai contoh pada masa sekarang sebuah bentuk gerakan politik arsip yang mampu membuka sebuah kebenaran.

F. KESIMPULAN

Dari kesemuanya itu, dapat dilihat bahwa *Skandal Donner* sebagai sebuah bentuk gerakan politik arsip di pemerintah kolonial Belanda. Skandal yang menyeret banyak pelaku di zaman itu. Dari para bupati di seluruh Jawa, para pegawai pemerintah, dan para jurnalis. Skandal yang menjatuhkan seseorang tanpa bukti apapun. Namun, penyelesaian masalahnya justru dari arsip. Arsip menjadi bukti sebuah kebenaran dari konflik politik yang terjadi.

Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. *Skandal Donner* merupakan gerakan politik arsip yang berkembang di pemerintah kolonial Belanda. *Skandal Donner* menjadi simbol kekuatan arsip dalam menjawab segala persoalan di masyarakat terutama perlawanan dalam ketidakbenaran suatu peristiwa terutama yang terjadi pada pemerintahan masalah kolonial. Arsip mampu mengalahkan konflik yang tidak berdasar karena arsip sebagai bukti yang obyektif. *Skandal Donner* merupakan peristiwa penurunan jabatan Bupati Madiun, Raden Adipati Brotodiningrat oleh Residen Madiun J.J. Donner. Penurunan Bupati Madiun ini ternyata dipenuhi oleh isu-isu kesengajaan. Skandal ini menimbulkan ketidaknyamanan suasana pemerintahan di Jawa terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Hal ini disebabkan adanya kekacauan kekuasaan dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda yaitu antara *Inlandsche Binnenlands Bestuur* (Korps Pemerintah Pribumi) dan *Nederlandse Binnenland Bestuur* (Korps Pemerintahan Belanda). Berkat kritikan-kritikan kepada pemerintah kolonial Belanda yang ditulis oleh Tirta Adhi Soerjo dalam *Pemberita Betawi*, pemerintah kolonial Belanda memeriksa dan menganalisa kembali kebijakan yang telah dilakukan mereka

dengan melihat arsip-arsip yang ada di *Algemene Secretarie* dan ternyata apa yang ditulis oleh Tirta Adhi Soerjo adalah benar meskipun vonis telah terlanjur dijatuhkan. *Skandal Donner* telah menjadi gerakan politik arsip pertama yang dilakukan oleh Tirta Adhi Soerjo. Dalam hal ini, jika terjadi konflik kekuasaan di pemerintahan tertentu maka untuk menjawab konflik tersebut salah satunya adalah dengan melihat arsip yang telah dibuat sebelumnya sehingga dapat diketahui akar permasalahannya.

2. *Skandal Donner* bagi dunia kearsipan adalah merupakan contoh kasus konflik pemerintahan pertama yang menjadikan arsip sebagai solusi dalam melihat permasalahan yang terjadi. Ketika ketidaknyaman terjadi di masyarakat akibat konflik yang terjadi di pemerintahan, maka untuk menjawabnya adalah melihat kembali arsip yang telah disimpan sebelumnya. Tentunya dalam pemerintahan apapun pasti memiliki lembaga kearsipan sebagai lembaga penyimpanan arsip. Ketika terjadi konflik di masyarakat, arsip menjadi salah satu cara untuk memecahkan permasalahan. Hal tersebut menjadi menunjukkan bahwa arsip mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sifat arsip yang obyektif akan mampu menggambarkan persoalan yang terjadi dan mampu memperlihatkan apa yang terjadi sebenarnya. *Skandal Donner* menjadi salah satu contohnya. Meskipun konflik dalam *Skandal Donner* begitu besar dikarenakan menyeret beberapa pejabat pemerintah kolonial Belanda namun akhirnya mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah dari kekuatan arsip. *Skandal Donner* merupakan contoh peristiwa di masa lalu yang memperlihatkan bahwa arsip menjadi kekuatan tersendiri yang mampu menjawab permasalahan di saat konflik yang terjadi semakin kacau. Arsip menjadi penyelamat terakhir di saat konflik kekuasaan semakin merajalela terutama yang menyangkut konflik di pemerintahan tertentu.

G. REKOMENDASI

Skandal Donner menjadi sebuah peristiwa di masa lalu untuk cerminan di masa sekarang maupun masa yang akan datang. *Skandal Donner* menunjukkan kekuatan gerakan politik arsip mampu mengatasi segala bentuk persoalan. Dalam *Skandal Donner* memperlihatkan bahwa arsip mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di ruang lingkup pemerintahan terutama berkaitan dengan kekuasaan di pemerintahan. *Skandal Donner* juga dapat dijadikan contoh kasus di masa lalu dalam penyelesaian konflik di masyarakat terutama yang berkaitan dengan konflik di pemerintahan.

Skandal Donner adalah contoh gerakan politik pertama kali yang menjadikan arsip sebagai fokus utamanya. Hal ini sangatlah penting untuk penyelesaian masalah konflik pemerintahan di masa sekarang dan di masa mendatang karena ketika terjadi konflik diantara kekuasaan yang berbeda di pemerintahan, maka untuk menjawabnya adalah merujuk kembali pada arsip-arsip yang telah dibuat sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 715

Algemene Secretarie Series Grote Bundel Besluit 1891-1942 No. 4025

Arsip Personal No. P03/018

Anderson, Benedict R.O'G, "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa" dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Anonim, "Gerakan Sosial di Indonesia: Pengertian dan Konsep Gerakan Sosial". (Online) Sumber elektronik diakses dari abichuenk.wordpress.com.

Anonim, "Teori-Teori Kekuasaan". (Online) Sumber elektronik diakses dari www.psychology.blogspot.com

Bagoes, Aden "Pengertian Gerakan Sosial Politik". (Online) Sumber elektronik diakses dari id.shvoong.com.

Basuki, Sulistyo., *Pengantar Kearsipan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996

Budiardjo, Miriam., *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Daliman, A., *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Daryan, Yayan dan Hardi Suhardi., *Terminologi Kearsipan Indonesia*, Jakarta: PT Sigma Cipta Utama, 1998.

Dwiandari, Nadia F., Dwi Nurmaningsih, dan M.Haris Budiawan, *Guide Arsip Statis Algemene Secretarie (1816) 1819-1950*, Jakarta: Direktorat Pengolahan Kedeputan Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011.

Fautanu, Idzam., *Filsafat Politik*, Jakarta: GP Press, 2013

Graaf, Bob de., *Kalm Te Midden Van Woedende Golven: Het Ministerie Van Kolonien En Zijn Taakomgeving 1912-1940*, Amsterdam: Sdu Uitgevers, Tanpa Tahun

Jenkinson, Hillary., *A Manual of Archives Administration Including the Problems of War Archives and Archive Making*, Oxford: Clarendon Press, 1922.

Lohanda, Mona., *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011, lampiran I

Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.

- McKemmish, Sue., “Introducing Archives and Archival Programs” dalam *Keeping Archives Second Edition*, Edited by Judith Ellis, Victoria: Thorpe in association with The Australian Society of Archivists Inc, 1993.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2013.
- Mufti, Muslim., *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Pembrita Betawi* Edisi tanggal 17 April 1902, 24 April 1902, 17 Mei 1902, 12 Juni 1902, 18 Juni 1902, 4 Agustus 1902
- Poldi, Andi “Gerakan Sosial Menurut Para Ahli ”. (Online) Sumber elektronik diakses dari [www. andipoldi.blogspot.com](http://www.andipoldi.blogspot.com).
- Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Stoler, Ann Laura., *Along Archival Grain: Epistemic Anxieties And Colonial Common Sense*, Princenton And Oxford: Princenton University Press, 2009.\
- Toer, Pramoedya Ananta., *Rumah Kaca*, Jakarta: Lentera Dipantara, 2011.
- Toer, Pramoedya Ananta., *Sang Pemula*, Jakarta: Hasta Mitra, 1985.
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 ayat 2.
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1 ayat 7.
- Yacob, Dharwis Widya Utama, “Implementasi Politik Etis Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Perkebunan Daerah Lampung, 1905-1930” , (Skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Universitas Gadjah Mada Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Yogyakarta, 2005), hal.18-19.